



**PROFIL
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2022**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya, maka penyusunan Profil Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai media informasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao menyajikan gambaran pelayanan dan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Dalam penyusunan Profil Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022, kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam menyajikan informasi gambaran pelayanan dan kinerja Bapelitbang secara lengkap dan sempurna. Untuk itu, semua masukan berupa saran dan kritik konstruktif diperlukan untuk menyempurnakan profil ini. Semoga Profil Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao menjadi media informasi tentang pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan menjadi bahan evaluasi kinerja Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao ke depan.

Ba'a, 17 Maret 2023

Kepala Bapelitbang Kab. Rote Ndao,



A. Diana A. Bullu, SE

Pembina

NIP. 19801209 200904 2 005

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Sejarah Singkat Bapelitbang Kab. Rote Ndao	1
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPELITBANG KAB. ROTE NDAO	3
A. Visi dan Misi Kabupaten Rote Ndao	3
B. Tugas Pokok dan Fungsi Bapelitbang Kab. Rote Ndao	3
C. Struktur Organisasi Bapelitbang Kab. Rote Ndao	10
D. Sumber Daya Bapelitbang Kab. Rote Ndao	12
E. Sumber Daya Modal	14
BAB III PEMBAHASAN	18
A. Administrasi	18
B. Transparansi Keuangan	21
C. Inovasi Perangkat Daerah	31
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	32
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	32
B. Telaahan Visi, Misi dan Program	33
C. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bapenas.....	34
D. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup	37
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .	41
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan.....	41
B. Program Kegiatan Bidang	41
BAB VI PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	44

LAMPIRAN – LAMPIRAN

<https://bit.ly/3ZXzdHA>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Bapelitbang Kab. Rote Ndao Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin	12
Tabel 2.2.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Bapelitbang Kab. Rote Ndao Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	12
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Bapelitbang Kab. Rote Ndao Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Jabatan	13
Tabel 2.4.	Jumlah Tenaga Kontrak Daerah Bapelitbang Kab. Rote Ndao Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	14
Tabel 2.5.	Daftar Nama Aset Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2022 ...	15
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	18
Tabel 3.2.	Rencana Kerja Tahunan	20
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	21
Tabel 3.4.	Indikator Kinerja Utama Bapelitbang Kab. Rote Ndao	28
Tabel 3.5.	Realisasi Keuangan Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2022..	29
Tabel 4.1.	Pemetaan Masalah untuk Penentuap Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	32
Tabel 4.2.	Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33
Tabel 4.3.	Permasalahan pelayanan Bapelitbang Kab. Rote Ndao Berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian PPN/Bapenas	36
Tabel 4.4.	Permasalahan pelayanan Bapelitbang Kab. Rote Ndao Berdasarkan RTRW	37
Tabel 5.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan.....	41
Tabel 5.2.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bidang	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022	11
Gambar 3.1. Tren Tersedianya Dokumen Perencanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perbub Tahun 2016-2022	24
Gambar 3.2. Tren Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2016-2022	25
Gambar 3.3. Tren Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Tahun 2016-2022	25
Gambar 3.4. Tren Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Perbatasan Tahun 2019-2022	25
Gambar 3.5. Tren Jumlah Kelitbangan yang Dilaksanakan Tahun 2016-2022	26
Gambar 3.6. Tren Presentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2017-2022	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) merupakan syarat mutlak dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai cita – cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. *Good governance* memerlukan adanya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyaraaktan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao dengan tugas pokoknya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan. Untuk itu Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao memaparkan Profil Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai gambaran hasil pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pada tahun berikutnya.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan profil Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 adalah:

- a. Menggambarkan sejauh mana ketersediaan sumber daya dan capaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao selama Tahun Anggaran 2022.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

C. Sejarah Singkat Bapelitbang Kab. Rote Ndao

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao (Bapelitbang) berada di pulau Rote di Provinsi Nusa Tenggara Timur. sebelumnya bernama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao (Bappeda) didirikan sejak terbentuknya Kabupaten Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2002. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao mempunyai deretan kepemimpinan sebagai berikut:

1. Drs. Alfred Zacharias, MSi Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2002 sampai Tahun 2009.
2. Drs. Sony Said Plt. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 sampai Tahun 2010.
3. Ir. Onisimus J. Ndoen, M.Si Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2010 sampai Tahun 2013.
4. Ir. Untung Harjito Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 sampai Tahun 2016.
5. Drs. Frengki J. Haning Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 sampai Tahun 2020.
6. Jeremi M. Haning, PhD Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 sampai Tahun 2022.
7. Diana A. Bullu, SE, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 sampai sekarang.

Pada Tahun 2017 terjadi perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao.

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Rote Ndao sebelumnya menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan kemudian mengelola 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan dengan memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Ekonomi, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Kemudian struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mengalami perubahan menjadi 5 Bidang yaitu Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPELITBANG KABUPATEN ROTE NDAO

A. Visi dan Misi Kabupaten Rote Ndao

1. Visi

Visi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024 yaitu: “ **Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang Bermartabat Dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian Dan Perikanan**”

2. Misi

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut;

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sector pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan;
3. Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik yang prima.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao

Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok yaitu “**Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan**”.

1. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;

- c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pengoordinasian kebijakan, di Sekretariat, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan dokumentasi perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- d. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan koordinasi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- f. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Sekretariat, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Analis Keuangan Pusat/Daerah (Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Aset), Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan), memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana operasional program dan anggaran di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan serta operasional di sekretariat;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Penatausahaan Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Aset, serta Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Analis Keuangan Pusat/Daerah (Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Aset) serta Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan).

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pemerintah Kabupaten Rote Ndao serta membuat rencana operasional di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator

Substansi Perencanaan dan Pendanaan, Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Data dan Informasi) dan Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan). Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berdasarkan rencana program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- c. Melaksanakan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD).
- d. Pengkoordinasian penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Skala Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan usulan dari Organisasi Perangkat Daerah tingkat Kabupaten agar tersedia pedoman perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan daerah.
- e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan dan pembangunan lingkup Pemerintah Kabupaten.
- f. Melakukan konsultasi pelaksanaan tugas/kegiatan dengan atasan langsung/instansi terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- h. Pengoordinasian penyusunan kebijakan dan atau regulasi berbasis tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kabupaten;
- i. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- j. Pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Pendanaan, Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Data dan Informasi) dan Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan).

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Kesehatan dan Kependudukan dan Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pemerintahan. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan rencana program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan operasional di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sub koordinator substansi Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, sub koordinator substansi Kesehatan dan Kependudukan dan sub koordinator substansi Pemerintahan;
- e. Pelaksanaan pengkajian, analisa, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sub koordinator substansi Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, sub koordinator substansi Kesehatan dan Kependudukan dan sub koordinator substansi Pemerintahan;
- f. Pelaksanaan pelaporan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksananan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi sub koordinator substansi Pendidikan dan Kesehatan Rakyat, sub koordinator substansi Kesehatan dan Kependudukan dan sub koordinator substansi Pemerintahan.

5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membuat rencana operasional di Bidang perekonomian dan sumber daya alam, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan, mengkaji, menganalisa, mengevaluasi dan pengendalian pelaksanaan

kegiatan meliputi Sub koordinator substansi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha, Sub koordinator substansi Pertanian dan Pangan dan Sub koordinator substansi Perekonomian dan Keuangan. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana operasional di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam berdasarkan rencana program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan operasional di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Sub koordinator substansi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha, Sub koordinator substansi Pertanian dan Pangan dan Sub koordinator substansi Perekonomian dan Keuangan;
- e. Pelaksanaan pengkajian, analisa, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Sub koordinator substansi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha, Sub koordinator substansi Pertanian dan Pangan dan Sub koordinator substansi Perekonomian dan Keuangan;
- f. Pelaksanaan pelaporan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan;
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi Sub koordinator substansi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha dan Sub koordinator substansi Pertanian dan Pangan serta Sub koordinator substansi Perekonomian dan Keuangan.

6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub koordinator substansi Infrastruktur dan Penataan Ruang, Sub koordinator substansi Prasarana Wilayah, Permukiman dan Lingkungan Hidup, dan Sub koordinator substansi Perbatasan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berdasarkan rencana program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan operasional di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Sub koordinator substansi Infrastruktur dan Penataan Ruang, Sub koordinator substansi Prasarana Wilayah, Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Sub koordinator substansi Perbatasan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. Pelaksanaan pengkajian, analisa, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Sub koordinator substansi Infrastruktur dan Penataan Ruang, Sub koordinator substansi Prasarana Wilayah, Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Sub koordinator substansi Perbatasan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi Sub koordinator substansi Infrastruktur Dan Penataan Ruang Dan Sub koordinator substansi prasarana wilayah, permukiman dan Lingkungan Hidup dan Sub koordinator substansi perbatasan, Perhubungan komunikasi Dan informatika.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung lingkup pemerintah Kabupaten Rote Ndao serta membuat rencana operasional di Bidang Penelitian dan Pengembangan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub koordinator substansi Sosial dan Pemerintahan, Sub koordinator substansi Ekonomi dan Pembangunan dan Sub koordinator substansi Inovasi dan Teknologi. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional di Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan rencana program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan kelitbangan di pemerintah kabupaten;

- c. Pelaksanaan fasilitasi inovasi kelitbangan daerah;
- d. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan lingkup pemerintah Kabupaten;
- e. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan lingkup Pemerintahan Kabupaten;
- f. Pengoordinasian penyusunan kebijakan dan atau regulasi berbasis tugas kelitbangan di Kabupaten;
- g. Pendampingan, rekomendasi dan pelaporan bagi warga negara asing yang melakukan penelitian di Kabupaten;
- h. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- i. Pelaksananan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi Sub koordinator substansi Sosial dan Pemerintahan, Sub koordinator substansi Ekonomi dan Pembangunan dan Sub koordinator substansi Inovasi dan Teknologi.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai di bidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan. Pada saat ini untuk Jabatan Fungsional di Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao belum dibentuk.

C. Struktur Organisasi Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao

Struktur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu Sekretariat dan 5 Bidang yakni:

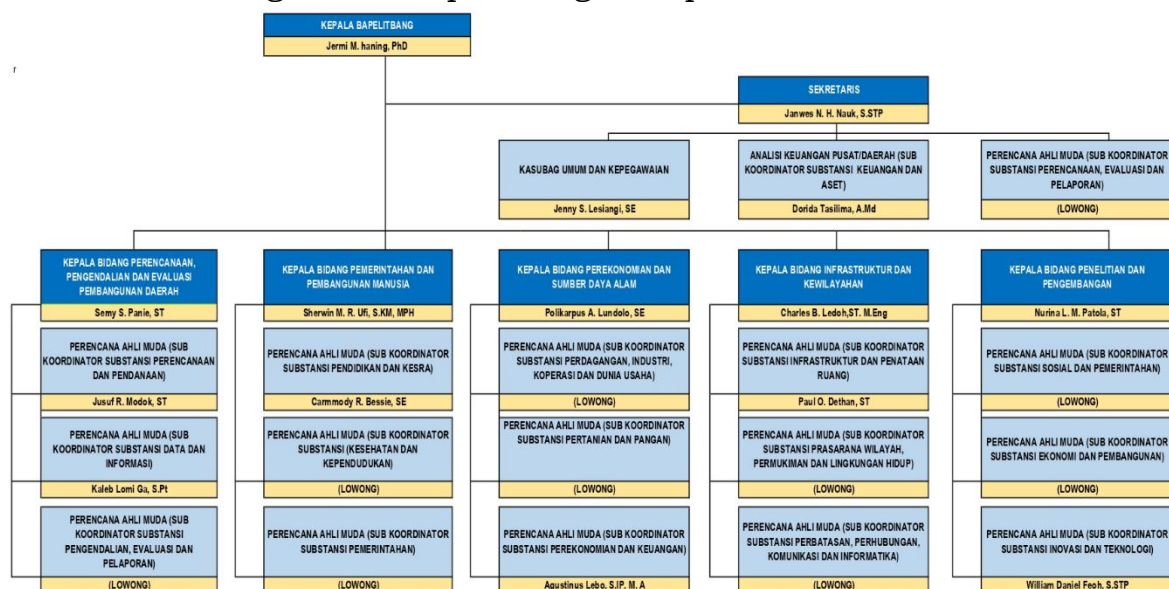
1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang membawahi 3 (tiga) Sub koordinator substansi, yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub koordinator substansi Keuangan dan Aset;
 - c. Sub koordinator substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Sub koordinator substansi Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub koordinator substansi Data dan Informasi;
 - c. Sub koordinator substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari :

- a. Sub koordinator substansi Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat
- b. Sub koordinator substansi Kesehatan dan Kependudukan; dan
- c. Sub koordinator substansi Pemerintahan
4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - a. Sub koordinator substansi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha;
 - b. Sub koordinator substansi Pertanian dan Pangan; dan
 - c. Sub koordinator substansi Perekonomian dan Keuangan.
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari :
 - a. Sub koordinator substansi Infrastruktur dan Penataan Ruang
 - b. Sub koordinator substansi Prasarana Wilayah, Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Sub koordinator substansi Perbatasan, perhubungan, komunikasi dan informatika.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Sub koordinator substansi Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Sub koordinator substansi Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Sub koordinator substansi Inovasi dan Teknologi.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022



Sumber Data : Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2022

D. Sumber Daya Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao

1. Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah

28 orang yang terdiri dari 22 orang laki-laki dan 6 orang perempuan dengan rincian pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Pangkat / Golongan Dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/b	Pembina Tk. I	1	0	1
2	IV/a	Pembina	3	1	4
Jumlah Golongan IV			4	1	5
2	III/d	Penata Tk I	5	1	6
3	III/c	Penata	4	1	5
4	III/b	Penata Muda Tk I	2	0	2
5	III/a	Penata Muda	3	2	5
Jumlah Golongan III			14	4	18
6	II/d	Pengatur	2	1	3
7	II/b	Pengatur Muda Tk. I/IIIB	2	0	2
Jumlah Golongan II			4	1	5
TOTAL			22	6	28

Sumber Data: Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2022

Tabel 2.1. menunjukkan bahwa jumlah ASN Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Rote Ndao sebanyak 28 orang terdiri dari golongan IV sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 18 orang dan golongan II sebanyak 5 orang. Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S3	1	0	1
2	S2	3	0	3
3	S1	13	4	17
4	D III	0	1	1
5	SLTA/SMK	5	1	6
Total		22	6	28

Sumber Data: Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2022

Tabel 2.2. menunjukkan bahwa jumlah ASN Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao sebanyak 28 orang terdiri dari pendidikan S3 berjumlah 1 orang, S2 berjumlah 3 orang, S1 berjumlah 17 orang, D III berjumlah 1 orang dan SLTA/SMK berjumlah 6 orang. Susunan kepegawaian pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3.

Jumlah pegawai Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Pangkat, Golongan Dan Jabatan Tahun 2022

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	Jermi M. Haning, PhD 19730615 199302 1 002	Pembina Tk. I/ IV B	Plt. Kepala Bapelitbang
2	Janwes N.H. Nauk, SSTP 19850120 200312 1 002	Pembina/ IV A	Sekretaris Bapelitbang
3	Polikarpus Adi Lundolo, SE 19740223 200604 1 007	Pembina/ IV A	Kabid. Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4	Carles B. Ledoh, ST.M.Eng 19761231 200604 1 048	Pembina/ IV A	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan
5	Sherwin M. R. Ufi, S.KM, MPH 19830512 200904 1 005	Penata Tk. I / IIID	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
6	Nurina L. M. Patola, ST 19800125 200904 2 004	Pembina/ IV A	Kabid. Penelitian dan Pengembangan
7	Semy S. Panie, ST 19820916 201001 1 021	Penata Tk. I / IIID	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PD
8	Kaleb Lomi Ga, S.Pt 19711117 200604 1 003	Penata Tk. I / IIID	Perencana Ahli Muda
9	Carmmody R. Bessie, SE 19770524 200904 1 001	Penata Tk. I / III D	Perencana Ahli Muda
10	Jenny S. Lesiangi, SE 19790613 201001 2 015	Penata Tk. I / III D	Kasubag. Umum & Kepegawaian
11	Agustinus Lebo, S. IP, MA 19850831 201503 1 002	Penata / III C	Perencana Ahli Muda
12	Dorida Tasilima, A.Md 19780615 200604 2 029	Penata / III C	Perencana Ahli Muda
13	Paul O. Dethan, ST 19771023 200501 1 011	Penata / III C	Perencana Ahli Muda
14	Jusuf Ronald Modok, ST 19851231 201503 1 004	Penata / III C	Perencana Ahli Muda
15	William Daniel Feoh, S.STP 19931115 201507 1 002	Penata / III C	Perencana Ahli Muda
16	Deny B. A. Taklal, S.KM 19841231 2010001 1 051	Penata Tk. I / III D	Staf
17	Tezer Rynaldo Ndoen, ST 19830525 201507 1 002	Penata Muda Tk.I/IIIB	Staf
18	Yohanes Riberu Esa, SP 19901112 201503 1 002	Penata Muda Tk.I/IIIB	Staf
19	Erasmus P. Sina 19710404 199903 1 008	Penata Muda / IIIA	Staf
20	Maximus. A.D B.P.J. Haning, S.STP 19970422 201908 1 001	Penata Muda / IIIA	Staf
21	Jermy Foeh, SE 19860620 202012 1 002	Penata Muda / IIIA	Staf
22	Desy Yuliaty Tungga, ST 19950701 202203 2 011	Penata Muda / IIIA	Staf
23	Dina Fictorina Lenggu, ST 19951211 202203 2 007	Penata Muda / IIIA	Staf
24	Jon Lussie 19810505 200701 1 010	Pengatur Tk. I / IID	Staf
25	Ester Rohi 19820304 200701 2 006	Pengatur Tk. I / IID	Staf
26	Amrisar Salmun Soru 19840325 200604 1 007	Pengatur Tk. I / IID	Staf
27	Yodi Petrus 19770728 201212 1 003	Pengatur /IIC	Staf
28	Dody Alexander Vanche 19801210 201406 1 004	Pengatur /IIC	Staf

Sumber Data: Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2022

Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, Pelaksanaan operasional Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao di

dukung tenaga kontrak daerah yang dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4.
Jumlah Tenaga Kontrak Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao
Berdasarkan Jabatan Dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Absalom E. Boik	Penjaga Kantor	1	-	1
2	Victor H. Nggelam, SE	Cleaning Service	1	-	1
3	Yesua Bauana	Sopir	1	-	1
4	Aksel Y. Littik, S.Pi	Tenaga Administrasi	1	-	1
5	Novly Zacharias, SE	Tenaga Administrasi	-	1	1
6	Netty H. Bessie, ST	Tenaga Administrasi	-	1	1
7	Semuel A. Folla, A. Md	Tenaga Administrasi	1	-	1
8	Datuk A. Basalamah, SE	Tenaga Administrasi	1	-	1
9	Lili. A. Rohi Mola, S.Sos	Tenaga Administrasi	-	1	1
10	Frengky D. Boik	Tenaga Administrasi	1	-	1
11	Jeskiel Bulan	Tenaga Administrasi	1	-	1
12	Semuel Ndun, A.Md	Tenaga Administrasi	1	-	1
13	Dinis L. Bowakh	Tenaga Administrasi	1	-	1
14	Setni Y. Fatu, S.Pd	Tenaga Administrasi	1	-	1
15	Yulius Ledoh	Tenaga Administrasi	1	-	1
16	Jendrianto O. Pandie, A.Md Par	Fasilitator AMPL	1	-	1
17	Frengki B. J. Tode, S.TP	Fasilitator AMPL	1	-	1
18	Iksan Kaleb Adu	Fasilitator Stunting	1	-	1
Total			15	3	18

Sumber Data : Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2022

Dilihat dari tabel 2.4 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kontrak di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao berjumlah 18 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 3 orang perempuan yang menduduki jabatan penjaga kantor sebanyak 1 orang, cleaning service sebanyak 1 orang, sopir 1 orang, tenaga administrasi 12 orang, fasilitator AMPL sebanyak 2 orang dan fasilitator stunting sebanyak 1 orang.

E. Sumber Daya Modal

Kelancaran Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao di dukung sarana, prasarana, peralatan kantor dan aset berjumlah 336 unit dimana aset yang baik berjumlah 315 unit, aset yang kurang baik berjumlah 4 orang dan aset kondisi rusak berat berjumlah 13 unit dapat dilihat pada tabel 2.5. berikut:

Tabel 2.5.
Daftar Aset Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022

NO	NAMA / JENIS BARANG	UNIT	TAHUN	KONDISI		
				B	KB	RB
1	2	3	4	5		
1	Station Wagon	1	2017	√		
2	Sepeda Motor Yamaha RX King	1	2003			√
3	Sepeda Motor Jupiter Z	1	2004			√
4	Sepeda Motor Mega Pro 160 CC	1	2007			√
5	Sepeda Motor Revo 100 CC	1	2007	√		
6	Sepeda Motor Revo 100 CC	1	2007	√		
7	Sepeda Motor Jupiter Z 115 CC	1	2010	√		
8	Sepeda Motor Jupiter Z 115 CC	1	2010	√		
9	Sepeda Motor Jupiter Z 115 CC	1	2010	√		
10	Sepeda Motor Jupiter 150 CC	1	2015	√		
11	Sepeda Motor Vixion 150 CC	1	2017	√		
12	Sepeda Motor Vixion 150 CC	1	2017	√		
13	Sepeda Motor Honda Vario 125 CC	1	2018	√		
14	Sepeda Motor Honda Vario 125 CC	1	2018	√		
15	Sepeda Motor Supra 100 CC	1	2006	√		
16	Sepeda Motor Honda Vario 125 CC	1	2019	√		
17	Af Generator Tone Generator	1	2010			√
18	Global Positioning System	4	2016			√
19	Lemari Kayu	4	2013	√		
20	Rak Besi	1	2018	√		
21	Rak Kayu	2	2014	√		
22	Filing Cabinet Besi	2	2004	√		
23	Filing Cabinet Besi	1	2009	√		
24	Filing Cabinet Besi	3	2013	√		
25	Filing Cabinet Besi	2	2018	√		
26	Filing Cabinet Besi	2	2018	√		
27	Filing Cabinet Besi	3	2019	√		
28	Brandkas	1	2004	√		
29	White Board	1	2004	√		
30	White Board	1	2009	√		
31	Papan Nama Instansi	1	2010	√		
32	Papan Pengumuman	1	2010	√		
33	Alat Kantor Lainnya	1	2018	√		
34	Meja Kerja Kayu	2	2002	√		
35	Meja Kerja Kayu	10	2003	√		
36	Meja Kerja Kayu	4	2005	√		
37	Meja Kerja Kayu	1	2005	√		
38	Meja Kerja Kayu	1	2006	√		
39	Meja Kerja Kayu	3	2012	√		
40	Meja Kerja Kayu	20	2016	√		
41	Meja Kerja Kayu	20	2016	√		
42	Kursi Besi/Metal	4	2019	√		
43	Meja Rapat	1	2003	√		
44	Meja Rapat	4	2006	√		
45	Meja Rapat	10	2019	√		
46	Lemari Kayu	1	2020	√		
47	Meja 1/2 Biro	1	2002	√		
48	Meja 1/2 Biro	1	2002	√		
49	Kursi Rapat	5	2004	√		
50	Kursi Rapat	1	2007	√		
51	Kursi Rapat	50	2012	√		
52	Kursi Tamu	1	2012	√		
53	Kursi Putar	2	2006			√
54	Sofa	1	2019	√		
55	Alat Pembersih lainnya	1	2020	√		
56	Alat Pembersih lainnya	1	2020	√		
57	A.C. Sentral	2	2015	√		
58	A.C. Window	1	2015	√		
59	A.C. Window	1	2015	√		

NO	NAMA / JENIS BARANG	UNIT	TAHUN	KONDISI		
				B	KB	RB
1	2	3	4	5		
60	A.C. Split Panasonic	3	2007			√
61	A.C. Split Panasonic	1	2007			√
62	A.C. Split Panasonic	1	2008	√		
63	A.C. Split Sharp	1	2018	√		
64	Kipas Angin	2	2003	√		
65	Sound System	1	2008			√
66	Sound System	1	2019			√
67	Lambang Garuda Pancasila	1	2006			√
68	Tiang Bendera	2	2006			√
69	Gordyin/Kray	2	2018	√		
70	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Trali Besi)	1	2006	√		
71	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Trali Besi)	2	2006	√		
72	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Trali Besi)	2	2006	√		
73	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Trali Besi)	1	2006	√		
74	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Trali Besi)	2	2006	√		
75	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	2005	√		
76	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	2005		√	
77	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	2006		√	
78	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	2011	√		
79	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	2012	√		
80	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	2012	√		
81	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	2020	√		
82	Camera Film	1	2014	√		
83	Camera Film	1	2017	√		
84	Lensa Kamera	1	2015	√		
85	P.C Unit Lenovo	1	2015	√		
86	P.C Unit Samsung	1	2015	√		
87	P.C Unit Samsung	1	2017	√		
88	P.C Unit	1	2017	√		
89	Lap Top (Lenovo V470)	6	2012	√		
90	Lap Top Lenovo	2	2014	√		
91	Lap Top (Asus A451L)	3	2014	√		
92	Lap Top	2	2015	√		
93	Lap Top	1	2015	√		
94	Lap Top Lenovo	1	2016	√		
95	Lap Top Asus	1	2018		√	
96	Lap Top Lenovo 330	2	2018	√		
97	Lap Top Lenovo 32)	6	2018	√		
98	Lap Top Lenovo	4	2019	√		
99	Lap Top (Asus ROG STRIX G531 GD)	1	2019		√	
100	Lap Top (Apple Mac Book MRQN21D / A Gold)	1	2020			√
101	Lap Top (Apple Mac Book MRQN21D / A Gold)	1	2020	√		
102	Lap Top Think Book	3	2020	√		
103	Laptop Asus M513UA	2	2022	√		
104	Laptop Acer Nitro	2	2022	√		
105	Laptop Acer A514-5574ZR	3	2022	√		
106	Monitor	1	2015	√		
107	Monitor	1	2015	√		
108	Printer Pixma MP 287	2	2018	√		
109	Printer Pixma MP 287	1	2018	√		
110	Printer Pixma MP 287	3	2018	√		
111	Printer Epson Portabel	2	2019	√		
112	Printer Epson L3110	1	2019	√		
113	Printer Pixma MP 287	1	2019	√		
114	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	2020	√		
115	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2015	√		
116	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2016	√		
117	Printer Pixma MP 287	4	2017	√		
118	Printer Pixma MP 287	5	2021	√		
119	Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson	4	2022	√		

NO	NAMA / JENIS BARANG	UNIT	TAHUN	KONDISI		
				B	KB	RB
1	2	3	4	5		
120	Peralatan Personal Komputer lainnya Cas Laptop	2	2014	√		
121	Peralatan Personal Komputer lainnya UPS	1	2015	√		
122	Peralatan Personal Komputer lainnya UPS	1	2017	√		
123	Peralatan Personal Komputer lainnya Memori 8 GB	2	2018	√		
124	Peralatan Personal Komputer lainnya UPS	1	2018	√		
125	Peralatan Personal Komputer lainnya Infocus Epson	2	2018	√		
126	Peralatan Personal Komputer lainnya Logitech	1	2020	√		
127	Server EBM	1	2015	√		
128	Server Intel	1	2015	√		
129	Modem	1	2016	√		
130	Peralatan Jaringan lainnya	1	2015	√		
131	Peralatan Jaringan lainnya	1	2015	√		
132	Peralatan Jaringan lainnya	2	2017	√		
133	Peralatan Jaringan lainnya	1	2017	√		
134	Genset	1	2021	√		
135	LCD Project / Infocus	1	2022	√		
136	AC	2	2021	√		
137	Wireless Audio 15"	1	2022	√		
138	Microphone Wireless	4	2022	√		
139	Harddisk External 2 TB	1	2022	√		
Total		336		319	4	13

Sumber Data: Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2022

BAB III

PEMBAHASAN

A. ADMINISTRASI

1. Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapelitbang Kab. Rote Ndao

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Tujuan/Sasaran				
				Realisasi			Target	
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah (%)	100	100	100	100	100
			Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (%)	100	100	100	100	100
			Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100	100	100
			Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	100	100	100
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	1	2	3	4	5
		Penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan (jenis)	3	6	9	12	15
			Presentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah (%)	100	100	100	100	100

Tujuan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, yaitu meningkatkan kualitas perencanaan dan penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah dengan 2 sasaran yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran ini mendukung tujuan meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik dan sasaran keterpaduan aplikasi layanan umum unsur SPBE pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

2. Rencana Kerja (RENJA)

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022, merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan selama Tahun 2022. Perubahan Renja Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 berpedoman kepada Perubahan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022. Dalam rangka menjamin terlaksananya program, kegiatan, dan sub kegiatan serta dalam rangka pencapaian kinerja, maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2022 dengan efektif dan efisien.
- b. Perubahan Renja Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran.
- c. Menjamin konsistensi dan sinergitas antara dokumen perubahan RKPD, dokumen Perubahan Renja dan dokumen pelaksanaan anggaran.
- d. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022.

Perubahan Renja Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip – prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2.
Rencana Kerja Tahun Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2022

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing	1.1. PDRB Perkapita ADHB*	Rp.24.705.000,-
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	2.1. Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%
		2.2. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%
		2.3. Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%
		2.4. Jumlah dokumen perencanaan kawasan perbatasan	1 Dokumen
3	Penerapan kelitbang untuk pembangunan daerah	3.1. Jumlah kelitbang yang dilaksanakan	3 Jenis
		3.2. Persentase Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100%

4. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao memiliki 36 Standar Pelayanan Operasional.

5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tidak Ada

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao tidak memiliki standar pelayanan minimal.

6. Jadwal Kegiatan Tahunan

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 memiliki 6 jadwal kegiatan berdasarkan bidang yaitu, Sekretariat, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 memiliki laporan kegiatan berdasarkan bidang yaitu Sekretariat, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

B. TRANSPARANSI KEUANGAN

1. RKA / DPA

Gambaran mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.582.575.850,- bertambah sebesar Rp.421.526.570,- atau 8,42% menjadi Rp.5.004.102.420,- dengan rincian:

- Belanja Operasi sebelum perubahan sebesar Rp.4.515.256.250,- berkurang sebesar Rp.291.234.100,- atau 6,06% menjadi Rp.4.806.490.350,- dengan rincian sebagai berikut:
- Belanja modal sebelum perubahan sebesar Rp.67.319.600,- berkurang sebesar Rp.130.292.470,- atau 65,93% menjadi Rp.197.612.070,-.

2. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU (RP)	REALISASI / OUTPUT
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	2.665.662.700	100%
		100%		100%
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19 Dokumen	19.962.580	19 Dokumen
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	12 Dokumen	16.966.400	12 Dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	2.996.180	7 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29 Org/Bulan	1.959.598.000	29 Org/Bulan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29 Org/Bulan	1.888.546.000	29 Org/Bulan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Orang	71.052.000	4 Orang
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Org/Bulan	9.960.000	2 Org/Bulan
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Org/Bulan	9.960.000	2 Org/Bulan
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 Org/Bulan	120.000.000	8 Org/Bulan

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU (RP)	REALISASI / OUTPUT
1	2	3	4	5
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	8 Org/Bulan	120.000.000	8 Org/Bulan
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	422.304.860	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41 Unit	2.053.700	41 Unit
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 Unit	193.536.370	19 Unit
	Penyediaan Logistik Kantor	12 bulan	35.033.290	12 bulan
		12 bulan		12 bulan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	155 Buku	26.240.500	155 Buku
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kali	165.441.000	10 Kali
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	66.988.650	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	209 Lembar	2.988.700	209 Lembar
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	63.999.950	12 Bulan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	66.848.610	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Unit	50.752.000	14 Unit
		1 Unit		1 Unit
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	20 Unit	8.119.410	20 Unit
	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	4.988.500	1 Unit
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	247 Kg	2.988.700	247 Kg
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100%	1.094.059.000	100%
8	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	651.932.300	100%
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	3 Dokumen	91.920.350	3 Dokumen
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Kali	18.644.100	1 Kali
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1 Dokumen	51.541.300	1 Dokumen
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Dokumen	99.789.200	3 Dokumen
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	11 Dokumen	85.360.520	11 Dokumen
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	304.676.830	1 Dokumen
		1 Dokumen		1 Dokumen
9	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	206.709.100	100%
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Jenis Buku	110.911.100	2 Jenis Buku
		1 Aplikasi		1 Aplikasi
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	3 Aplikasi	95.798.000	3 Aplikasi
10	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	8 Dokumen	235.417.600	8 Dokumen
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	4 Dokumen	94.797.700	4 Dokumen
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	140.619.900	4 Dokumen
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100%	640.980.830	100%
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	58 Dokumen	257.099.600	58 Dokumen
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40 Dokumen	19.999.890	40 Dokumen
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	4 Kali	34.999.930	4 Kali

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU (RP)	REALISASI / OUTPUT
1	2	3	4	5
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18 Dokumen	34.999.820	18 Dokumen
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Lembaga	167.099.960	3 Lembaga
		1 Forum		1 Forum
		11 Kali		11 Kali
		4 Kali		4 Kali
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	26 Dokumen	201.999.990	26 Dokumen
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14 Dokumen	19.999.980	14 Dokumen
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5 Kali	42.051.570	5 Kali
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10 Dokumen	19.999.700	10 Dokumen
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	14 Kali	119.948.740	14 Kali
		2 Dokumen		2 Dokumen
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	11 Dokumen	181.881.240	11 Dokumen
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Dokumen	19.999.880	4 Dokumen
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5 Kali	37.800.750	5 Kali
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6 Dokumen	39.999.490	6 Dokumen
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	84.081.120	1 Dokumen
		10 Kali		10 Kali
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3 Jenis	569.788.940	3 Jenis
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Jenis	385.000.160	1 Jenis
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Jenis	385.000.160	1 Jenis
15	Pengembangan inovasi dan teknologi	100%	184.788.780	100%
	Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Jenis	26.580.100	1 Jenis
	Diseminasi Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	14 Kali	158.208.680	14 Kali
		46 Inovasi		46 Inovasi
V	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	1 Dokumen	33.610.950	1 Dokumen
16	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	1 Dokumen	33.610.950	1 Dokumen
	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	33.610.950	1 Dokumen
	TOTAL		5.004.102.420	

3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

a. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

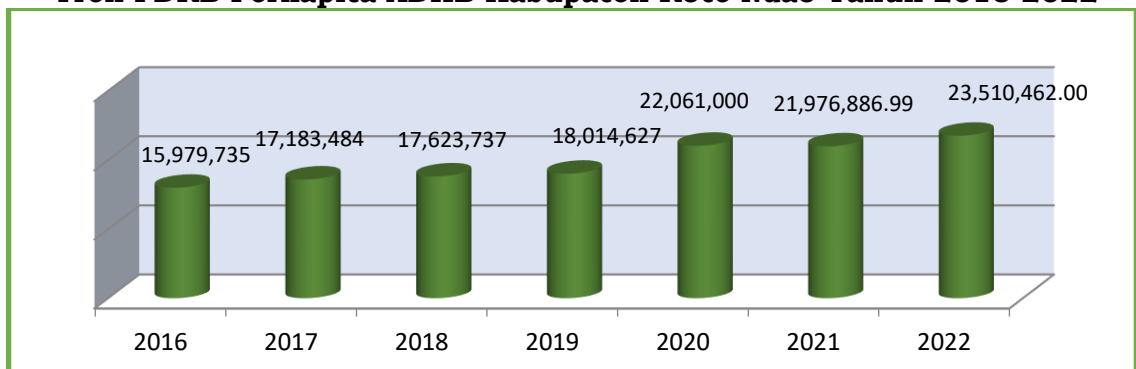
SASARAN 1

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing

1. PDRB Perkapita ADHB

Tren realisasi indikator kinerja PDRB Perkapita ADHB selama 7 (tujuh) Tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami kinerja yang fluktuatif yakni tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang positif namun pada tahun 2021 mengalami penurunan dan tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup positif seperti pada tabel berikut:

Gambar 3.1.
Tren PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016-2022



Sumber data: Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2022

SASARAN 2

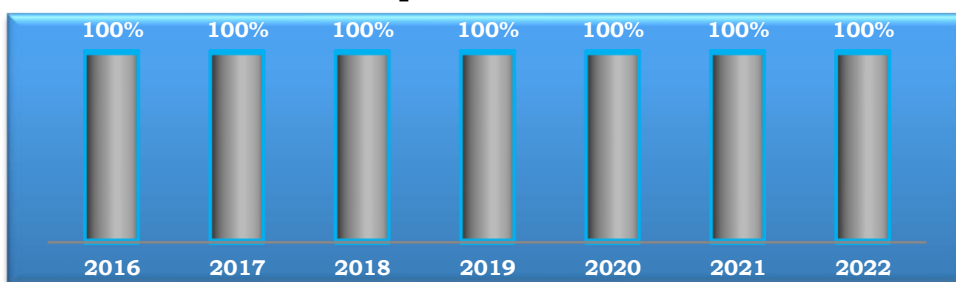
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

1. Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Tren realisasi tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati selama 7 (tujuh) Tahun terakhir menunjukkan capaian sama secara signifikan yakni periode 2016-2022 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Gambar 3.2.
Tren Tersedianya Dokumen Perencanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perbup Tahun 2016-2022

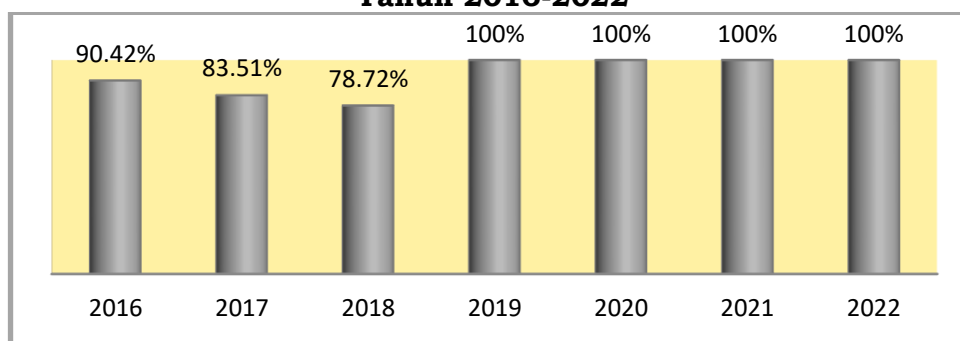


Sumber data: Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2022

2. Penjabaran Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD

Tren realisasi penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD selama 7 (tujuh) Tahun terakhir menunjukkan capaian sama secara signifikan yakni periode 2016-2022 dengan capaian kinerja sebesar 100% seperti pada tabel berikut:

Gambar 3.3.
Tren Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2016-2022

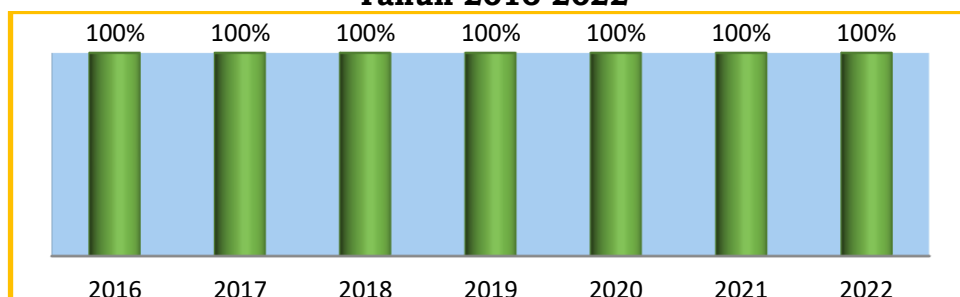


Sumber data: Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2022

3. Penjabaran konsistensi RKPD kedalam APBD

Tren realisasi penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD selama 7 (tujuh) Tahun terakhir menunjukkan capaian sama secara signifikan yakni periode 2016-2022 dengan capaian kinerja sebesar 100% seperti pada tabel berikut:

Gambar 3.4.
Tren Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD Tahun 2016-2022

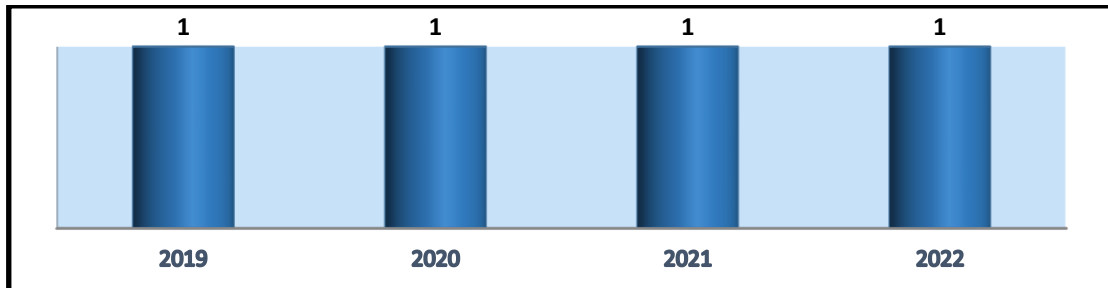


Sumber data: Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2022

4. Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Perbatasan

Tren realisasi jumlah dokumen perencanaan kawasan perbatasan selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian sama secara signifikan yakni periode 2019-2022 dengan capaian kinerja sebesar 100% seperti pada tabel berikut:

Gambar 3.5.
Tren Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Perbatasan Tahun 2019-2022



Sumber data: Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2022

SASARAN 3

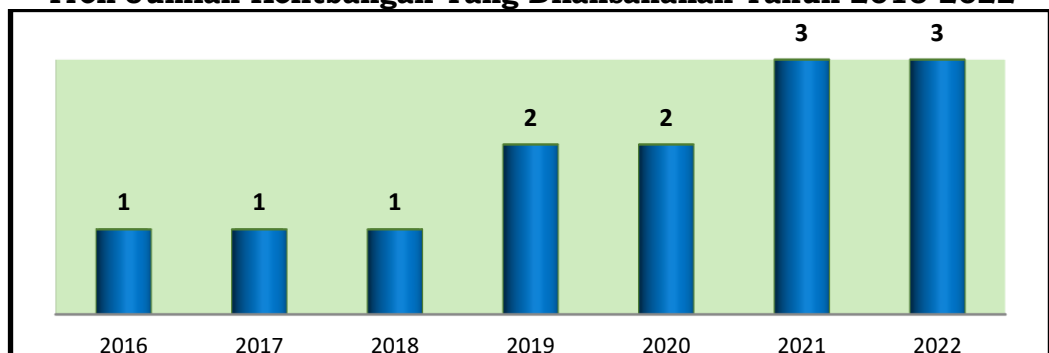
Penerapan Kelitbangan Untuk Pembangunan Daerah

Penelitian dan pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

1. Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan

Tren realisasi jumlah kelitbangan yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami peningkatan kinerja secara signifikan yakni periode Tahun 2016-2022 terus mengalami peningkatan positif setiap tahunnya seperti pada tabel berikut:

Gambar 3.6.
Tren Jumlah Kelitbangan Yang Dilaksanakan Tahun 2016-2022

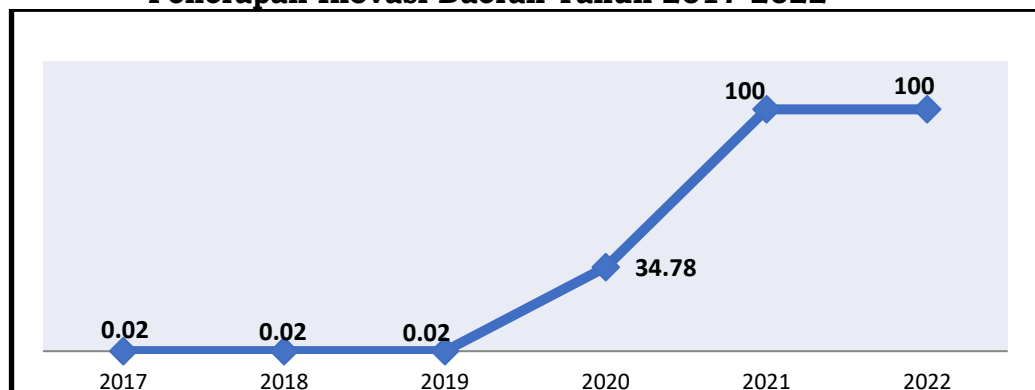


Sumber data: Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2022

2. Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah

Tren realisasi Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah selama 6 (enam) Tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami peningkatan kinerja yang sangat signifikan yakni periode Tahun 2017-2022 terus mengalami peningkatan positif setiap tahunnya seperti pada tabel berikut:

Gambar 3.7.
Tren Presentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2017-2022



Sumber data: Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2022

4. Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Penyelenggara urusan pemerintahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut;

- Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan (*Tidak ada*)
- Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan (*Tidak ada*)
- Urusan Pilihan (*Tidak ada*)
- Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan
Sebanyak 5 program, 16 kegiatan dan 43 sub kegiatan yang mendukung Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai sasaran di Tahun 2022.

5. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator)
Bapelitbang Kab. Rote Ndao

Sasaran	Indikator		Formula Pengukuran	Satuan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing	1.	PDRB Perkapita ADHB*	$\frac{\text{Nilai PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu ADHB}}$	Rp
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	2.	Dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang disusun serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati}}{\text{Target dokumen perencanaan yang disusun}} \times 100$	%
	3.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan}} \times 100$	%
	4.	Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD	$\frac{\text{Jumlah program APBD tahun berkenan}}{\text{Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan}} \times 100$	%
	5.	Jumlah dokumen perencanaan kawasan perbatasan	Jumlah rencana aksi daerah pengelolaan perbatasan yang disusun di Tahun n-1 ditambah Tahun n	Dokumen
Penerapan Kelitbangan Untuk Pembangunan Daerah	6.	Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan	Jumlah penelitian, pengembangan, pengkajian yang dilaksanakan di tahun n-1 ditambah Tahun n	Jenis
	7.	Persentase Perangkat Daerah yang di Fasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100$	%

Sumber Data: Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2022

6. Laporan Keuangan

Adapun kinerja keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel. 3.5.
Realisasi Keuangan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	BELANJA	5,004,102,420	4,926,730,656	98.45
	Belanja Modal	197,612,070	191,158,000	96.73
	Belanja Pegawai	1,947,496,000	1,890,505,456	97.07
	Belanja Barang dan Jasa	2,858,994,350	2,845,067,200	99.51
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2,665,662,700	2,596,117,156	97.39
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19,962,580	19,944,800	99.91
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	16,966,400	16,959,000	99.96
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,996,180	2,985,800	99.65
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,959,598,000	1,902,603,456	97.09
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,888,546,000	1,831,555,456	96.98
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71,052,000	71,048,000	99.99
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9,960,000	9,959,000	99.99
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9,960,000	9,959,000	99.99
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120,000,000	117,500,000	97.92
6	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	120,000,000	117,500,000	97.92
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	422,304,860	415,772,020	98.45
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,053,700	2,052,050	99.92
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193,536,370	187,082,800	96.67
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,033,290	35,033,250	100.00
10	Penyediaan Bahan/Material	26,240,500	26,240,470	100.00
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165,441,000	165,363,450	99.95
6	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66,988,650	63,495,280	94.79
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,988,700	2,986,500	99.93
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63,999,950	60,508,780	94.55
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66,848,610	66,842,600	99.99
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,752,000	50,746,000	99.99
15	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	8,119,410	8,119,400	100.00
16	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	4,988,500	4,988,500	100.00
17	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2,988,700	2,988,700	100.00
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,094,059,000	1,092,401,450	99.85
7	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	651,932,300	650,910,750	99.84

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
18	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	91,920,350	91,911,000	99.99
19	Pelaksanaan Konsultasi Publik	18,644,100	18,637,100	99.96
20	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	51,541,300	51,541,300	100.00
21	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	99,789,200	99,644,450	99.85
22	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	85,360,520	85,359,500	100.00
23	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	304,676,830	303,817,400	99.72
8	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	206,709,100	206,080,100	99.70
24	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	110,911,100	110,639,100	99.75
25	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	95,798,000	95,441,000	99.63
9	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	235,417,600	235,410,600	100.00
26	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	94,797,700	94,790,700	99.99
27	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	140,619,900	140,619,900	100.00
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	640,980,830	636,264,100	99.26
10	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	257,099,600	254,147,690	98.85
28	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	19,999,890	19,999,700	100.00
29	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	34,999,930	34,887,800	99.68
30	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	34,999,820	34,999,290	100.00
31	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	167,099,960	164,260,900	98.30
11	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	201,999,990	200,773,600	99.39
32	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	19,999,980	19,999,900	100.00
33	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	42,051,570	40,919,200	97.31
34	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	19,999,700	19,999,700	100.00
35	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	119,948,740	119,854,800	99.92
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	181,881,240	181,342,810	99.70
36	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	19,999,880	19,999,610	99.99
37	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	37,800,750	37,728,750	99.81
38	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	39,999,490	39,992,350	99.98
39	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	84,081,120	83,622,100	99.45
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	569,788,940	568,772,200	99.82
13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	385,000,160	384,836,650	99.96
40	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	385,000,160	384,836,650	99.96

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
14	Pengembangan inovasi dan teknologi	184,788,780	183,935,550	99.54
41	Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	26,580,100	26,580,100	100.00
42	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	158,208,680	157,355,450	99.46
V	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	33,610,950	33,175,750	98.71
15	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	33,610,950	33,175,750	98.71
43	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	33,610,950	33,175,750	98.71

Berdasarkan tabel 3.5 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

- Belanja Pegawai sebesar Rp.1.947.496.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.890.505.456,- atau 97.07% dari target yang ditetapkan.
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp.2.858.994.350,- dengan realisasi sebesar Rp.2.845.067.200,- atau 99,5% dari target yang ditetapkan.
- Belanja modal sebesar Rp.197.612.070,- dengan realisasi sebesar Rp.191.158.000,- Atau 96,73% dari target yang ditetapkan.

Alokasi anggaran pada Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.5.004.102.420,- (Lima miliar empat juta seratus dua ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.4.926.730.656,- (empat miliar Sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) atau sebesar 98,45% yang terdiri dari 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 43 (Empat puluh tiga) sub kegiatan.

C. INOVASI PERANGKAT DAERAH

Perkembangan teknologi menuntut Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao melakukan terobosan dengan membuat aplikasi MANELEO, Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan sangat membantu mengontrol tupoksi dari semua ASN.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao

Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, perencanaan pembangunan. Berdasarkan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kabupaten Rote Ndao saat ini telah dan selalu giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang, melalui proses evaluasi dan penyempurnaan program-program kerja yang dilaksanakan terhadap RPJMD. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao dilakukan berdasarkan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao 2019-2024. Untuk menentukan isu strategis, didahului dengan melakukan identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan pokok sampai dengan akar permasalahannya. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

Tabel 4.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya perencanaan penelitian dan Pengembangan pembangunan daerah	Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah belum optimal	Efektivitas usulan pembangunan dari pelaku pembangunan belum optimal
			Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan data
			informasikebutuhan perencanaan pembangunan
			Belum optimalnya sinergi perencanaan pembangunan
			Fungsi evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan belum optimal
			Prinsip perencanaan pembangunan berbasis <i>money follow program</i> belum optimal
		Belum optimalnya penelitian dan pengembangan pada pemerintah daerah	Kurangnya kegiatan kajian/penelitian dalam menjawab permasalahan pembangunan daerah
			Belum optimalnya pelaksanaan Inovasi Daerah
		Kapasitas Kelembagaan Bapelitbang yang belum memadai	Keahlian dan ketrampilan SDM perencana Bapelitbang belum memadai/terpenuhi
			Lemahnya koordinasi perencanaan internal dan antar perangkat Daerah

			Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja
			Belum optimalnya penerapan SOP

Tabel 4.2

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (Diluar) Kewenangan Perangkat Daerah	
Gambaran Pelayanan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao, Kajian Terhadap Renstra Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao, Kajian Terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Kajian terhadap RTRW	Masih adanya kesenjangan capaian di antara beberapa indikator kinerja	IKK	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen - Kualitas SDM - Kuantitas Personalia 	<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi anggaran - Ketersediaan Sarana dan Prasarana - Kebijakan - Koordinasi lintas sektor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah belum optimal 2. Kapasitas Kelembagaan Bapelitbang yang belum memadai

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tahun 2019-2024 memiliki visi dan misi sebagai berikut:

VISI : Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata yang di dukung oleh Pertanian dan Perikanan.

MISI:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan;
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rote Ndao periode 2019-2024 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Rote Ndao mendukung visi dan misi tersebut di atas, terutama pada *Misi Keempat*: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima. Sebagai bahan telaahan terhadap Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2019-2024 dilakukan identifikasi beberapa permasalahan, beserta faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao.

Faktor Penghambat:

1. Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
2. Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
3. Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
4. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

Faktor Pendorong:

1. Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
2. Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
3. Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

C. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bapenas dan Renstra Bapelitbangda Provinsi NTT

1. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bapenas

Sesuai pedoman yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah perlu memperhatikan Renstra Kementerian dan Lembaga. Untuk itu renstra Bapelitbang perlu melakukan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas menetapkan dua tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu: Terwujudnya rencana

pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi; dan didukung dengan empat faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana kerja. Beberapa sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas yaitu:

1. Terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas” adalah :
 - a. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - b. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap RPJMN;
 - c. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap RKP.
2. Terlaksananya Penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan Pembangunan Nasional adalah: persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden.

2. Telaahan Renstra Bapelitbangda Provinsi NTT

Dokumen Renstra Bapelitbangda Provinsi NTT merupakan bahan acuan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda Provinsi NTT dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bapelitbang sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi demi menghasilkan informasi dan data dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi; Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang, urusan dan lintas sektor demi perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
3. Optimalisasi kelembagaan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas;
4. Konsistensi antar dokumen perencanaan;
5. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan aksesibel.

Untuk mewujudkan lembaga perencanaan yang handal, kredibel, dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara, maka permasalahan pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao berdasarkan sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 4.3

Permasalahan Pelayanan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPN/Bappenas	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Semakin diakuinya nilai-nilai (values) universal.	1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah belum optimal 2. Kapasitas Kelembagaan Bapelitbang yang belum meadai	1. Kurang tersedianya SDM Perencana	1. Adanya regulasi Kementerian PPN/Bappenas 2. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Kelompok masyarakat, pemuka agama dan lainnya.
2.	Semakin meningkatnya peran swasta dan masyarakat		2. Keterbatasan dana untuk mendukung program/kegiatan Perencanaan	
3.	Semakin meningkatnya Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.		3. Terbatasnya data dan informasi Pembangunan Daerah 4. Perencanaan program/kegiatan yang belum optimal	

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada sub bab ini akan dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Rote Ndao yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4

Permasalahan Pelayanan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas & Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Semakin diakuinya nilai-nilai (values) universal.	1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah belum optimal 2. Kapasitas Kelembagaan Bapelitbang yang belum memadai	1. Kurang tersedianya SDM Perencana	1. Adanya regulasi Kementerian PPN/Bappenas
2.	Semakin meningkatnya peran swasta dan masyarakat		2. Keterbatasan dana untuk mendukung program/kegiatan Perencanaan	2. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Kelompok masyarakat, pemuka agama dan lainnya.
3.	Semakin meningkatnya Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.		3. Terbatasnya data dan informasi Pembangunan Daerah 4. Perencanaan program/kegiatan yang belum optimal	

Didalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan kesesuaian dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasilguna dan berdayaguna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang, dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi :

1. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
2. Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
3. Perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten Rote Ndao;
4. Penetapan kawasan strategis;
5. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Rote Ndao;
6. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor; dan
7. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Dibidang lingkungan hidup, pemerintah juga sudah menerbitkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana didalamnya mengamanatkan kewajiban untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RTRW Kabupaten. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten terhadap kondisi lingkungan hidup, termasuk di dalamnya rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan program, serta rekomendasi-rekomendasi perbaikan pengambilan keputusan untuk menjamin pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten mempunyai kedudukan strategis dalam pelaksanaan program – program pembangunan di daerah. Pembangunan akan berjalan optimal salah satunya dipengaruhi oleh adanya perencanaan yang berkualitas. Sebagai institusi perencanaan pembangunan di daerah dan sejalan dengan Visi dan Misi Bapelitbang Kabupaten, maka perencanaan pembangunan di daerah dilaksanakan secara sinergis dengan RTRW Kabupaten Rote Ndao, baik yang menyangkut rencana struktur ruang maupun rencana pola ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah sebagai alat dalam mengkoordinasikan, merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program-program sektoral. Adanya Badan Koordinasi

Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di Kabupaten, akan memperkuat sinergisitas dan sinkronisasi wilayah dalam menserasikan penataan ruang daerah.

a. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Gambaran pelayanan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Bapelitbang dihadapkan pada isu strategis antara lain:

- a. Belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi serta monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
- b. Masih lemahnya system pendataan/informasi/data pembangunan daerah
- c. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas serta pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan belum maksimal sesuai perkembangan zaman.

2. Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas

Terdapat beberapa faktor penghambat didalam pencapaian sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas, antara lain :

- a. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan.
- b. Masih adanya kesenjangan pemahaman antar para pemangku kepentingan terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan.

3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao;

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.

4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao; Saran dan tindak lanjut dari hasil penyusunan KLHS adalah :

- a. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao harus menyediakan program updating data dan informasi daerah agar dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan KLHS;
- b. Isu yang ada masih sangat banyak, sehingga pada kesempatan lain perlu untuk melakukan identifikasi isu strategis dengan lebih tajam;

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bapelitbang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pemahaman beberapa dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao yaitu:

1. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas ASN Bapelitbang dalam mendukung pelaksanaan tugas perencanaan penelitian dan pengembangan;
2. Belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan konsistensi serta monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
3. Masih lemahnya sistem pendataan/informasi/data pembangunan daerah
4. Penerapan perencanaan berbasis *e-Planning*
5. Belum optimalnya penggunaan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN TAHUN 2022

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao memiliki Program Penunjang Urusan Pemerintahan dengan kegiatan dan sub kegiatan dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan/Material
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

B. Program Kegiatan Bidang

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao memiliki program, kegiatan dan sub kegiatan pada 5 bidang dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut

Tabel 5.2
Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Bidang

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
	Pelaksanaan Konsultasi Publik
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
II	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
6	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
III	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
7	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
8	Pengembangan inovasi dan teknologi
	Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN
9	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama
	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Profil Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 menyajikan:

1. Informasi pelayanan Badan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022.
2. Gambaran pencapaian kinerja dan anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022.
3. Laporan hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 dapat dilihat pada link **<https://bit.ly/3ZXzdHA>**

B. Saran

Profil Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 menjadi bahan masukan untuk pencapaian kinerja dan sasaran dalam melaksanakan tugas perencanaan, penelitian dan pengembangan dan buku profil Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 perlu dipublikasikan.

Ba'a, 17 Maret 2023

 Kepala Bapelitbang Kab. Rote Ndao


Diana A. Bullu, SE
Pembina
NIP. 19801209 200904 2 005